

Pendidikan Politik Calon Pemilih Pemula untuk Pelajar SMA di Ponorogo dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024

Irfa'i Afham¹, Kris Nugroho^{1*}, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti¹

¹Universitas Airlangga

e-mail: ¹knugroho_fisip@unair.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Selain itu, program ini juga ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kesiapan dan partisipasi dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024 yang akan menjadi catatan penting bangsa Indonesia di mana persiapannya tidak cukup jika hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga memerlukan kesiapan elemen masyarakat sipil dalam hal ini calon pemilih pemula yang memiliki makna penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kegiatan sebagai turunannya adalah: (a) Sosialisasi tentang Makna Kepemimpinan Politik dan Organisasi Politik; (b) Sosialisasi tentang Menyongsong Pemilu Serentak 2024; (c) Simulasi Pemilu Serentak 2024. Metode yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memadukan antara kajian kualitatif di perguruan tinggi dengan sosialisasi dan praktik langsung (action research) di lapangan. Pengabdian masyarakat berbasis bottom-up ini melibatkan pula para aktor lokal di antaranya dinas-dinas di Kabupaten Ponorogo dan Komisi Pemilihan Umum Ponorogo dengan sasaran 50 orang siswa SMA/ Setara calon pemilih pemula di Ponorogo. Pada akhirnya, outcome yang diharapkan dari program pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya kesadaran politik dan peran aktif siswa SMA dalam Pemilu Serentak 2024.

Kata kunci: Calon Pemilih Pemula, Pemilu Serentak 2024, Kesadaran Politik, Pendidikan Politik, Pembangunan Politik

ABSTRACT

This community service program aims to provide early political education. In addition, this program is also specifically aimed at increasing readiness and participation in welcoming the 2024 Simultaneous Elections, which will be an important note for the Indonesian nation where preparation is not enough if only carried out by election organizers but also requires the readiness of civil society elements, in this case, prospective new voters who have an important meaning. To achieve this goal, several activities as derivatives are: (a) Socialization of the Meaning of Political Leadership and Political Organizations; (b) Socialization of Welcoming the 2024 Simultaneous Elections; (c) Simultaneous Election Simulation 2024. The method used in this community service combines qualitative studies at universities with socialization and direct practice (action research) in the field. This bottom-up community service also involves local actors, including agencies in Ponorogo Regency and the Ponorogo General Election Commission, targeting 50 high school students/equivalent prospective new voters in Ponorogo. Ultimately, the expected outcome of this community service program is increased political awareness and the active role of high school students in the 2024 Simultaneous Elections.

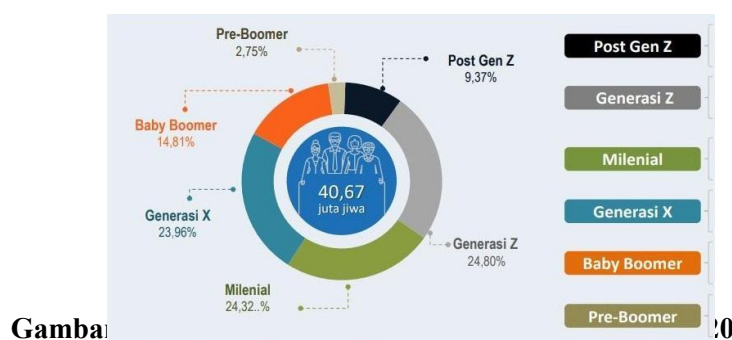
Keywords: First-Time Voters, 2024 Simultaneous Elections, Political Awareness, Political Education, Political Development

PENDAHULUAN

Agenda demokrasi melalui mekanisme pemilihan tidaklah dapat dicapai sendirian melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Para pemilih (*voters*) memiliki makna penting dalam menentukan sirkulasi elite yang selanjutnya menentukan arah pembangunan politik Indonesia. Indonesia hingga beberapa dekade ke depan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan masyarakat usia produktif. Dalam budaya politik Indonesia, mereka dikenal sebagai pemuda. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan), Pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam sejarahnya, mereka memiliki peranan-peranan penting bahkan sebagai pendorong cikal-bakal kemunculan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa melalui revolusi dan transformasi yang panjang di abad 20.

Pengenalan politik pada generasi muda atau pemuda dalam bentuk sosialisasi dipilih oleh tim pengabdian masyarakat. Kristina F. Brezicha (2018) berpendapat bahwa sosialisasi politik memiliki peran penting untuk menempa beragam pengetahuan, keahlian, nilai, hingga watak para pelajar. Sehingga, strategi dalam restrukturisasi kelas pembelajaran dan masyarakat memiliki makna penting dalam menginternalisasi generasi muda dalam kewarganegaraan. Pada akhirnya sosialisasi politik pada generasi muda juga bertujuan untuk mendorong realisasi komunitas yang dibayangkan (*imagined communities*) dalam masyarakat yang lebih inklusif (Brezicha, 2018). Akan tetapi, penelitian di sejumlah negara maju anglo-saxon yaitu Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru menunjukkan bahwa para pemuda di sana semakin tidak terlibat dalam politik (*less engaged*) dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, terlebih seiring dengan penguatan nilai-nilai individualisme (Suchowerska, 2013). Fakta sosial ini memunculkan pertanyaan pada kondisi di Indonesia seiring dengan dinamika sosial dan politik dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 setidaknya terdapat sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat (24,00 persen) penduduk Indonesia masuk sebagai kategori pemuda. Corak pemuda pun tidaklah tunggal, tiap generasi memiliki berbagai karakteristik yang berbeda. Kemudian, seiring dengan perkembangannya, Generasi Z (Gen Z) yang merupakan generasi yang lahir dari 1997 hingga 2012 semakin memiliki jumlah yang signifikan dalam populasi Indonesia. Sebelumnya, berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah Generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,94 persen dari total populasi penduduk di Indonesia.



(Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/penduduk-jawa-timur-didominasi-milenial-dan-generasi-z/>)

Sementara itu, berdasarkan hasil sensus penduduk Jawa Timur pada 2020, struktur penduduk Provinsi Jawa Timur didominasi oleh Generasi Milenial (lahir tahun 1981-1996) dan Generasi Z (lahir tahun 1997-2012). Meski demikian, tidak dapat dikesampingkan realitas bahwa mayoritas pemuda di Indonesia merupakan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat pada

2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, persentase pemuda yang menamatkan pendidikannya hingga SMA atau sederajat sebesar 39,6 persen (Rizaty, 2022). Hal ini seringkali luput dari pandangan bahwa populasi Indonesia didominasi oleh anak muda dan usia produktif. Mereka mengemban tugas penting dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anak-anak SMA umumnya akan mulai memenuhi syarat legal untuk memilih dalam Pemilu karena sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun. Jumlah mereka yang signifikan tidak dapat dipandang sebelah mata. Para calon atau kandidat dalam kontestasi politik mendatang tentu ceruk suara ini sebagai suatu potensi yang harus dimaksimalkan. Akan tetapi para calon pemilih pemula yang didominasi oleh pelajar Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan atau yang setara menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Di sini mereka dituntut untuk mampu membangun kesadaran politik yang kuat dalam menentukan pilihan mereka dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.

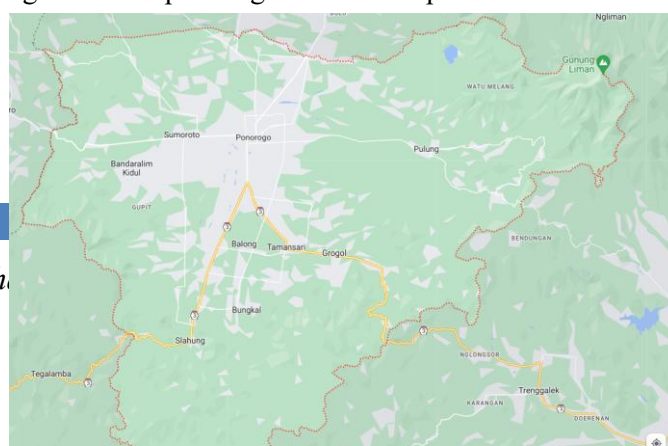
Selain itu mereka menghadapi sejumlah permasalahan yang lekat dengan gambaran publik atas calon pemilih pemula:

1. Dianggap apatis dan tidak tahu apa-apa soal pemilihan umum,
2. Dianggap belum cukup dewasa untuk menentukan pilihan politik,
3. Dianggap belum memiliki wawasan dan pengetahuan cukup terkait politik dan demokrasi,
4. Mereka harus menghadapi Pemilu Serentak 2024 yang akan berlangsung jauh lebih kompleks dengan banyaknya kandidat calon dan partai yang harus dipilih di setiap kategori dan tingkatan pemilihan yang dilakukan serentak,
5. Ancaman politik uang yang belum dipahami,
6. Ancaman disinformasi dan ujaran kebencian dalam pemilu yang juga mengancam para pemilih pemula.

Mau tidak mau, calon para pemilih pemula harus siap menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dapat muncul dalam Pemilu Serentak 2024. Berkaitan transformasi sosial dan politik, pendidikan politik menjadi sangat fundamental bagi para calon pemilih pemula SMA. Pendidikan politik berupa penguatan literasi politik dan praktek memilih diharapkan dapat memperkuat karakter calon pemilih pemula dan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada mereka.

Pendidikan politik erat kaitannya dengan politik kewarganegaraan. Lebih lanjut lagi, Eric Hiariej dan Kristian Stokke (2022) menjelaskan bahwa politik kewarganegaraan di Indonesia di era kontemporer merupakan hasil dari kegagalan gerakan pro-demokrasi yang berimplikasi pada penguatan elitisme pasca reformasi sementara perjuangan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian politik kewarganegaraan tetap memiliki signifikansi dalam pendidikan politik dalam kaitannya dengan mendorong keterlibatan sipil dan memperkuat kesadaran politik. Di sisi lain, politik kewarganegaraan bukanlah praktik tunggal, melainkan sangat beragam berdasarkan isu, aktor, strategi, kapasitas, dan wilayah (Hiariej & Stokke, 2022). Sehingga pengenalan politik yang bersifat bottom up dipilih untuk menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal dan kebutuhan atau tantangan yang dimiliki.

Sebagai lokasi pengmas, daerah pinggiran Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah dipilih guna mendapatkan gambaran atas persoalan demokrasi di daerah.



Gambar 2: Peta Kabupaten Ponorogo

(Sumber: <https://www.google.com/maps>)

Sebagai sasaran pengabdian Masyarakat, Kabupaten Ponorogo dipilih karena merupakan daerah pinggiran Jawa Timur yang acapkali luput dari wacana pembangunan politik Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan program pengmas dapat memotret dan membantu pembangunan politik masyarakat sipil Ponorogo.

METODE PELAKSANAAN

Secara konstitusional, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga pada implementasinya Indonesia memerlukan suatu sistem yang mampu membangun bangsa yang demokratis. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mendorong penguatan sistem demokrasi, pengembangan praktik berdemokrasi dan mengatur sirkulasi elite di Indonesia. Berdasarkan UU Pemilu, Pemilu bertujuan untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Selain itu, Pemilu juga bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

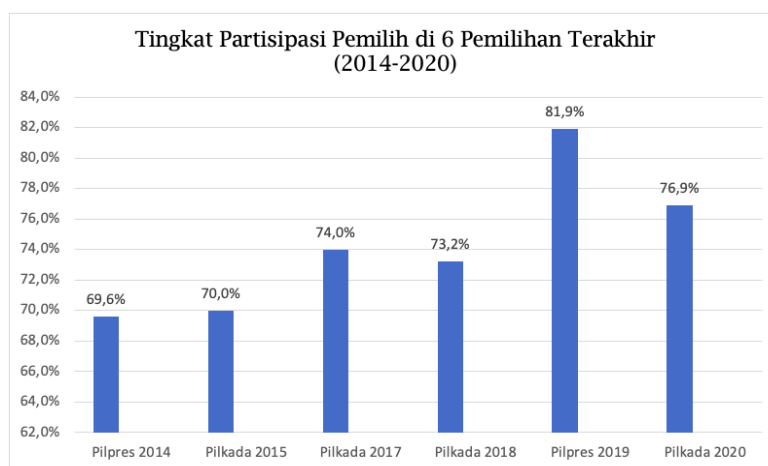
Kemudian UU Pemilu terbaru ini merupakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Sebelumnya pada Pemilihan Umum 2019, presiden, wakil presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan anggota badan legislatif daerah dipilih melalui proses yang bersamaan pada hari yang sama dan ini merupakan catatan sejarah nasional Indonesia. Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) mendatang, pemilihan umum akan memiliki cakupan yang jauh lebih luas mencakup dan akan mencakup pula bupati/walikota, gubernur DPRD kabupaten/ kota, dan DPRD provinsi. Ini akan menjadi catatan Indonesia dengan proses yang akan jauh lebih kompleks karena diselenggarakan secara serentak yang otomatis merubah mekanisme yang telah ada sebelumnya.

Pemilu 2024 akan memiliki implikasi pada perkembangan demokrasi Indonesia. Mekanisme pemilihan umum serentak diharapkan dapat mendorong penguatan sistem politik dan sistem kepartaian di Indonesia. Melalui ide tersebut, proyek besar demokrasi ini diharapkan mampu mendorong transformasi sosial dan politik masyarakat Indonesia. Dalam realitasnya, transformasi ini tidak dapat dicapai sendirian oleh pemerintah atau lembaga negara, melainkan melibatkan berbagai pihak khususnya dari entitas masyarakat sipil.

Berkaca dari Pemilu 2019, metode serentak memunculkan pertanyaan tentang model serentak seperti apa yang akan sesuai untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XVI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

terhadap UUD 1945, MK menyampaikan bahwa Pemilu Serentak harus memperhatikan pertimbangan pokok yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentukan UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas (Subiyanto, 2020, p. 362-3). Pemilu Serentak 2019 telah meninggalkan berbagai catatan terkait penyelenggaraan pemilu mulai dari integritas penyelenggara hingga praktik di lapangan.

Achmad Edi Subiyanto (2020) berpendapat bahwa seharusnya Presiden, DPR RI dan para penyelenggara pemilu seharusnya merespon Putusan MK dengan proses penyusunan kebijakan dengan landasan bukti yang kuat yang para prosesnya didasarkan pada simulasi penyelenggaraan. Tingkat partisipasi pemilih seringkali menjadi salah satu variabel dalam mengukur praktik demokrasi di suatu negara.



Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id

Gambar 3: Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir

(Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)

Berdasarkan data KPU, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari 69,6 persen pada Pemilu 2014 menjadi 81,9 persen. Dari sudut pandang penguasa, partisipasi pemilih sering dikaitkan sebagai instrumen guna mengukur keberhasilan pemilihan, penilaian kesadaran politik, dan menilai legitimasi para pemenang pemilihan (Hamonangan, Fauzias, & Arlington, 2022). Di sisi lain implementasi demokrasi di Indonesia semakin terbatas dan membatasi potensi perlawanan kekuatan politik alternatif.

Oleh karena itu, penguatan kesadaran politik di tingkat lokal kepada pemuda diperlukan untuk mendorong budaya demokrasi lokal yang berimplikasi secara nasional. Julianna Sandell Pacheco (2008) berpendapat bahwa sosialisasi politik pada pemuda dapat mendorong peningkatan kompetisi politik di level lokal. Peningkatan kompetisi sendiri dapat berkontribusi pada penguatan kualitas demokrasi mengingat demokrasi yang mensyaratkan keragaman dalam mekanisme atau proses politik.

Di sisi lain, Eve Warburton dan Edward Aspinall (2019) berpendapat bahwa Indonesia tengah mengalami regresi demokrasi melalui manipulasi proses-proses elektoral yang menutup peluang munculnya ruang untuk oposisi. Kondisi tersebut semakin parah karena publik yang memandang demokrasi sebagai konsep yang utopis. Pertimbangan-pertimbangan yang menitikberatkan pada agenda penguatan budaya politik demokratis diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.

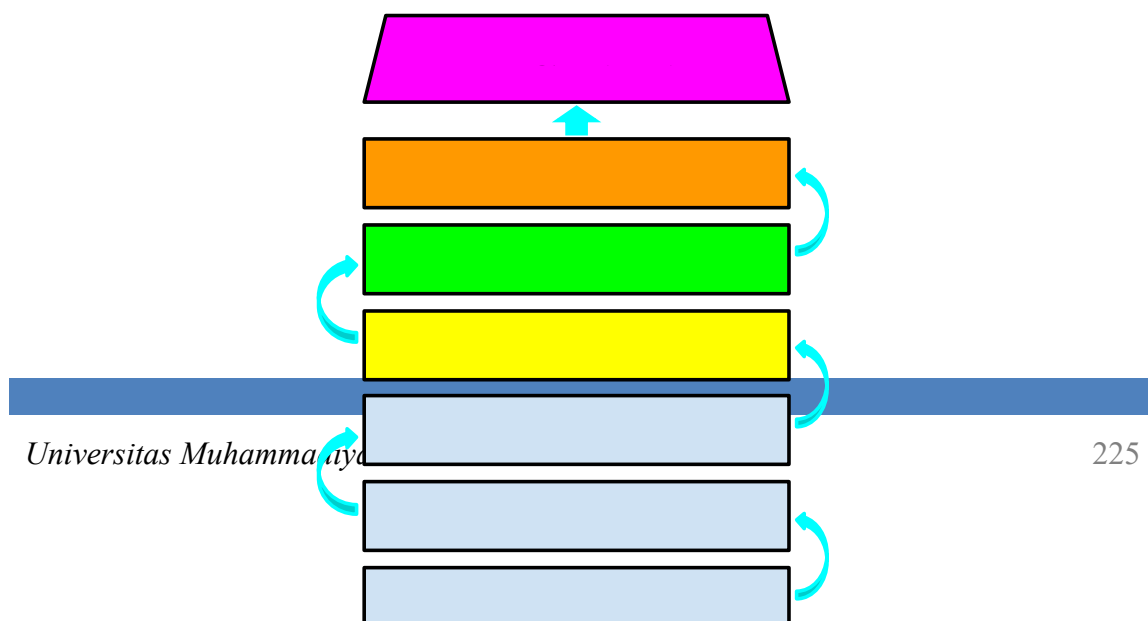
Secara fundamental, pencarian kebaikan bersama berkaitan dengan formulasi dan representasi kepentingan rakyat. Pemilu merupakan salah satu manifestasi demokrasi langsung sebagai mekanisme kontrol elemen masyarakat sipil terhadap para elite. Oleh itu, Pemilu bermakna penting bagi agenda demokrasi. Di sisi lain, Pemilu yang demokratis juga mensyaratkan kesiapan entitas sipil dalam mekanisme tersebut. Sehingga pendidikan politik bersifat fundamental terhadap proses pembentukan budaya politik warga negara. Negara modern mensyaratkan warga negara yang memiliki kesadaran politik, bukan hanya tentang kewajiban melainkan juga hak sebagai warga negara. Di sini hak politik mereka memiliki makna penting dan menjadi pembeda sistem politik demokratis di negara modern dengan sistem politik lainnya.

Posisi anak muda dan calon pemilih pemula sangatlah penting untuk pembangunan politik di Indonesia. John B. Holbein dan D. Sunshine Hillygus (2020) berpendapat bahwa suara anak muda lebih dari pandangan normatif terkait partisipasi warga negara yang penting untuk tujuan kewarganegaraan dan kesehatan demokrasi secara umum, karena menargetkan suara anak muda merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Oleh karena itu, para pemilih atau calon pemilih pemula perlu dipersiapkan sejak awal melalui pendidikan politik. Berbagai pihak perlu dilibatkan secara aktif dalam menyiapkan calon pemilih pemula. Selain itu, para anak muda ini juga merupakan aset dalam merawat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Tim Pengmas dari Departemen Politik terdiri dari Dosen, perwakilan mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Politik. Kegiatan ini diselenggarakan dalam tiga bentuk, yaitu "Seminar tentang Makna Kepemimpinan Politik dan Organisasi Politik", "Seminar tentang Menyongsong Pemilu Serentak 2024", dan "Simulasi Pemilu Serentak 2024". Ketiganya merupakan metode yang paling sesuai dalam strategi peningkatan partisipasi pemilih pemula di Sekolah Menengah Atas di Ponorogo.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan pada Hari Rabu, 20 September 2023 di Aula Gedung Terpadu, Jl. Basuki Rahmad, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dalam proses pelaksanaan ketiga kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat Universitas Airlangga telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, KPU Ponorogo, dan Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo dan Magetan.

Berikut adalah Skema Pengabdian Masyarakat yang dipilih Departemen Politik, Universitas Airlangga dengan metode *bottom-up*:



Gambar 4: Skema Pengabdian Masyarakat
(Sumber: Departemen Politik, UNAIR)

HASIL KEGIATAN

Dalam berbagai pengalaman dari pengabdian-pengabdian masyarakat terdahulu, terdapat pertanyaan terkait keikutsertaan aktif komunitas yang disasar dalam program pengabdian masyarakat. Sebelumnya, Randy Stoecker dan Elizabeth Tryon (2009) menyoroti peran aktif pembelajaran pengabdian (*service learning*) dalam memperkuat otonomi anggota masyarakat untuk terlibat aktif sebagai aktor kunci dalam mencapai tujuan/ agenda dari pemberdayaan atau pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat, muncul pertanyaan terkait bagaimana menempatkan anggota masyarakat sebagai agensi aktif yang memiliki kapabilitas dan otonomi dalam menentukan perubahan sosial dan menentukan masa depannya melalui pertimbangan rasional. Selain itu, peningkatan pembelajaran pengabdian (*service learning*) merupakan bentuk tanggung jawab dalam memperkuat signifikansi mitra dalam masyarakat dan menjauhkan mereka dari pola marginalisasi peran dalam proses sosial dan politik yang terjadi (Stoecker & Tryon, 2009). Pemberdayaan anggota masyarakat sebagai agensi mendorong agenda pembangunan yang semakin berfokus pada kebutuhan dan permasalahan empiris yang ada dalam komunitas lokal.

Generasi muda di Ponorogo diharapkan mampu menjadi para penggerak komunitas lokal mereka dan mengambil peran sebagai pemimpin di masa sekarang maupun masa depan. Sebagai hasil pendidikan politik, para pemilih muda juga dapat memegang peranan lain sebagai pengawas independen yang turut membantu memantau dan mengawasi jalannya mekanisme pemilihan umum hingga akhir. Pada akhirnya peran tersebut berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Hélène Landemore (2020) berpendapat bahwa guna membangun demokrasi terbuka harus ada setidaknya tiga prinsip yakni hak partisipatif, musyawarah, dan transparansi. Tiga prinsip ini penting untuk menunjang mekanisme formal pemilihan umum. Melalui prinsip-prinsip tersebut, para pemilih pemula dapat turut mengambil berbagai peran. Akan tetapi, sebelumnya mereka memerlukan peningkatan literasi politik. Tim Pengmas Universitas Airlangga mengambil peranan dalam mendorong transformasi sosial dan politik para calon pemilih pemula SMA di Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan dirinya menyongsong Pemilu Serentak 2024.

Wiel Veugelers dan Isolde de Groot (2019) berpendapat bahwa pendidikan memiliki fungsi penting guna menginternalisasikan generasi muda ke dalam masyarakat. Sosialisasi atau pendidikan politik di Ponorogo dilakukan agar daerah yang jauh dari ibu kota provinsi ini dapat memperoleh peningkatan kapasitas integrasi lintas generasi ke dalam masyarakat. Di sisi lain, kewarganegaraan memiliki makna sebagai hak legal dan suatu tanggung jawab dalam komunitas

lokal, nasional, maupun global (Veugelers & de Groot, 2019). Signifikansi ini mendorong generasi muda agar memahami makna penting politik yang berimplikasi pada kehidupan mereka.

Pada tahap persiapan, pengabdian masyarakat ini tim telah melakukan pemetaan potensi pemilih pemula SMA dan memetakan para pihak yang dapat membantu pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Pada tahap pertama Tim Pengmas melakukan sosialisasi terkait kepemimpinan dan organisasi politik. Selanjutnya pada tahap kedua, Tim Pengmas dengan berkolaborasi bersama KPU Ponorogo menyelenggarakan Seminar Menyongsong Pemilu Serentak 2024. Pada tahap ketiga, Tim Pengmas mengajak calon pemilih pemula SMA melakukan simulasi pemilihan umum.



Gambar 5: Sosialisasi tentang Menyongsong Pemilu Serentak 2024 kepada siswa SMA calon pemilih pemula (20/9/2023)

(Sumber: Departemen Politik, UNAIR)

Simulasi yang kreatif dan menyenangkan diharapkan dapat memantik ketertarikan para calon pemilih pemula pada pemilu dan demokrasi. Tantangan muncul dalam mengelola hubungan dengan para aktor lokal. Sebelumnya, Elizabeth Tryon, Amy Hilgendorf, dan Ian Scott (2009) menyoroti pentingnya komunikasi yang positif dan saling memahami untuk membangun *community engagement* untuk berfokus pada tujuan dari pembelajaran pemberdayaan (*service learning*) dan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Kerja-kerja yang demikian memerlukan beragam skill berkomunikasi lintas budaya dan pada berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat lokal mampu merasa menjadi bagian penting dari program atau agenda yang diselenggarakan.



Gambar 6: Simulasi Pemilu Serentak 2024 yang diberikan KPU Ponorogo kepada siswa SMA calon pemilih pemula (20/9/2023)
(Sumber: Departemen Politik, UNAIR)



Gambar 7: Simulasi Pemilu Serentak 2024 turut diikuti mahasiswa S1 Ilmu Politik yang juga akan menjadi calon pemilih pemula (20/9/2023)
(Sumber: Departemen Politik, UNAIR)

Tim Pengmas Departemen Politik menggandeng Pemerintah Ponorogo guna mengkonsolidasikan agenda pembangunan dan pendidikan politik di tingkat lokal. Tim Pengmas kemudian dapat mengakses sumber daya dan infrastruktur yang Pemerintah Daerah untuk mensukseskan agenda pendidikan politik. Guna memperkuat realisasi dan kontekstualisasi dengan Pemilihan Umum Serentak 2024, Tim Pengmas juga menggandeng KPU Ponorogo. Melalui strategi tersebut, Tim Pengmas dapat meminjam alat peraga pemilu beserta contoh model surat suara untuk melakukan praktek Pemilihan Umum. Dalam sosialisasi, Tim Pengmas tidak hanya mengambil contoh fenomena politik di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Strategi ini dipilih untuk memperkuat kemampuan anak muda untuk membandingkan beragam fenomena politik di berbagai belahan dunia akan membantu para pemuda guna melihat dunia yang lebih luas

dan politik begitu bermakna dalam kehidupan manusia (Ortuoste, 2012). Peningkatan wawasan dan kemampuan dasar dalam berpikir kritis ini diharapkan mendorong generasi muda untuk membaca persoalan politik dan menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik

No	Solusi	Luaran	Progres Awal
1.	Sosialisasi terkait apa itu politik, kepemimpinan politik dan organisasi politik	Mampu menjelaskan tentang konsep dasar politik.	Pelajar memperoleh pendidikan dasar politik dan kepemimpinan politik.
2.	Pengenalan makna penting Pemilihan Umum 2024	Mampu menjelaskan makna dan tantangan Pemilu Serentak 2024	Pelajar memahami tentangan yang harus mereka hadapi sebagai pemilih pemula dan maknanya
3.	Simulasi pemilihan umum dan pengawasan pemilihan umum	Mampu mempraktikkan langsung simulasi pemilihan dan pengawasan pemilu	Pelajar mampu mengetahui bagaimana proses pemungutan suara dan pengawasannya

masyarakat setempat.

Gambar 8: Solusi Permasalahan dan Progres Awal

(Sumber: Departemen Politik, UNAIR)

Perubahan politik tidak jarang memakan waktu sangat panjang, salah satu contohnya adalah dalam implementasi praktik demokrasi. Penerapan demokrasi dapat dilihat sebagai suatu eksperimen dalam proyek politik. Meski demikian muncul pertanyaan mengenai posisi rakyat dalam proses atau mekanisme politik dalam melahirkan subyektivitas demokrasi (Biesta, 2014). Di dalam proses tersebut terdapat beragam aktor sosial dan politik dan menghasilkan kesuksesan ataupun kegagalan sesuai apa yang direncanakan. Gert Biesta (2014) menegaskan bahwa eksperimen demokrasi adalah proses perubahan politik sehingga diharapkan memiliki signifikansi sebagai suatu proses pembelajaran. Pada prosesnya penerapan secara *top-down* memiliki banyak sekali limitasi dalam memperkuat nilai-nilai dan norma-norma demokrasi dalam masyarakat. Kemudian, Gert Biesta (2014) menggarisbawahi bahwa pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam eksperimen demokrasi guna membentuk makna penting dari pengalaman dan keterlibatan sebagai bagian penting dari proses politik tersebut.

Meski demikian, terdapat banyak dinamika sosial dan politik dalam penerapannya. Selanjutnya, Ioana G. Hulbert dan Deirdre Harkins (2024) menguraikan bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan keterlibatan atau keterikatan warga negara dengan kewarganegaraan dan politik melalui pengintegrasian kesadaran politik, norma-norma demokrasi, dan peran tidak langsung dalam mendorong partisipasi melalui status sosial dan perilaku. Sehingga pendidikan dalam artian luas kepada pemuda diharapkan menstimulasi perkembangan demokrasi dalam masyarakat sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat dengan topik “Peningkatan Literasi Calon Pemilih Pemula SMA di Kabupaten Ponorogo dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024” ditujukan agar dapat memberikan manfaat yang berfokus pada pembangunan politik. Pendidikan politik yang partisipatif penting untuk menginternalisasi nilai-nilai demokratis dan mengintegrasikan generasi muda ke dalam kehidupan kewarganegaraan yang aktif dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Di sini generasi muda dipersiapkan untuk mengambil peran penting dalam kepemimpinan politik dan pengorganisasian politik di masa depan. Selain itu, praktek atau simulasi pemilihan umum dalam program pengabdian ini ditujukan agar generasi muda lebih memiliki kepekaan politik dan menjadi bagian dari proses besar politik yang saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan topik, analisis masalah, dan pemecahan solusi permasalahan didasarkan pada pendekatan *bottom-up* yang berangkat dari permasalahan empiris setempat dan melibatkan masyarakat Ponorogo dalam memecahkan permasalahan secara solutif. Tulisan ini mendorong penelitian-penelitian lanjutan terkait pembangunan politik dengan pola *bottom-up* dengan memposisikan generasi muda sebagai agensi penting dalam mendorong perubahan politik lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Biesta, G. (2014). Learning in Public Places: Civic Learning for the Twenty-First Century. In Biesta, G., De Bie, M., & Wildemeersch, D. (Eds.), *Civic Learning, Democratic Citizenship and the Public Sphere* (pp. 1-11). Springer Netherlands.
- Brezicha, K. F. (2019). Reimagining Education’s Role in the Imagined Community: Toward a More Comprehensive Theory of Political Socialization. *The Good Society*, 27(1–2), 29–60. <https://doi.org/10.5325/goodsociety.27.1-2.0029>
- Hamonangan J. H., Fauzias A. A., & Arlington P. (2022, February 26). Tingkat Partisipasi dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2022). Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia. In Hiariej, E., & Stokke, K. (Eds.). (2022). *The Politics of Citizenship in Indonesia* (pp. 1-16). Yayasan Pustaka Obor & Springer.
- Holbein, J. B., & Hillygus, S. (2020). Making Young Voters: Converting Civic Attitudes into Civic Action. Cambridge University Press.
- Hulbert, I. G., & Harkins, D. (2024). *Assessing the Civic Campus: The Link Between Higher Education and Democracy*. ITHAKA S+R. <http://www.jstor.org/stable/resrep61189>
- Landemore, H. (2020). Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. Princeton University Press.
- Ortuoste, M. (2012). Youth, Life, and Politics: Examining the Everyday in Comparative Politics. *PS: Political Science and Politics*, 45(2), 285–290. <http://www.jstor.org/stable/41433694>
- Pacheco, J. S. (2008). Political Socialization in Context: The Effect of Political Competition on Youth Voter Turnout. *Political Behavior*, 30(4), 415–436. <http://www.jstor.org/stable/40213326>
- Rizaty M. A.. (2022,). Mayoritas Pemuda Indonesia Lulusan SMA pada 2022. DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/mayoritas-pemuda-indonesia-lulusan-sma-pada-2022>
- Stoecker, R., & Tryon, E. A. (2009). Unheard Voices: Community Organizations and Service Learning. In Stoecker, R., & Tryon, E. A. (Eds.). (2009). *The Unheard Voices: Community Organizations and Service Learning* (pp. 1-18). Temple University Press.

- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Suchowerska, R. (2013). A GENERATIONAL MODEL OF YOUTH'S ENGAGEMENT IN POLITICS. *International Review of Modern Sociology*, 39(1), 89–109. <http://www.jstor.org/stable/43496480>
- Tryon, E. A., Hilgendorf, A., & Scott, I. (2009). The Heart of Partnership: Communication and Relationships. In Stoecker, R., & Tryon, E. A. (Eds.). (2009). *The Unheard Voices: Community Organizations and Service Learning* (pp. 96-115). Temple University Press.
- Veugelers, W., & Groot, I. de. (2019). Theory and Practice of Citizenship Education. In W. Veugelers (Ed.), *Education for Democratic Intercultural Citizenship* (Vol. 15, pp. 14–41). Brill. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvrk389.6>
- Warburton, E, Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285. DOI:10.1355/cs41-2k